

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang padat. Kota Malang adalah salah satu contoh kota yang mengalami peningkatan jumlah kendaraan yang pesat. Baik orang luar kota yang menempuh pendidikan di Kota Malang maupun orang lokal sendiri. Hal tersebut dipengaruhi oleh berkembangnya ekonomi masyarakat di Kota Malang, maka keinginan warga untuk memiliki kendaraan lebih dari satu pun tidak dapat dihindari. Selain itu dengan dibukanya berbagai pusat perbelanjaan di berbagai kawasan yang menawarkan berbagai fasilitas dan tawaran untuk menarik minat pembeli selaku konsumen. Pusat perbelanjaan yang menjamur inipun menyediakan fasilitas berupa penitipan barang. Salah satu fasilitas penitipan barang yang disediakan adalah penitipan kendaraan bermotor baik sepeda motor maupun mobil, penitipan ini dikenal oleh masyarakat dengan sebutan parkir. Jumlah kendaraan yang semakin hari semakin meningkat membuat penataan parkir semakin tidak terkendali. Banyak pengguna kendaraan bermotor memarkirkan kendaraannya di tempat yang tidak seharusnya sehingga membuat kemacetan yang parah dan tanpa memperdulikan resiko yang di dapat. Hal tersebut mendorong pengelola parkir berlomba-lomba untuk memperluas lahan area parkirnya dengan harapan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Terutama di wilayah hukum Kota Malang. Banyak dijumpai juga jasa parkir tersebut sering kali menimbulkan

masalah, penerapan tarif parkir yang tidak sesuai, penggunaan klausa baku yang seharusnya tidak dicantumkan pada karcis, sampai masalah kehilangan kendaraan bermotor .

Dalam Pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata atau biasa disebut dengan KUHPerdata menjelaskan bahwa “ *Penitipan adalah terjadi, apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya*”. Maksud dari pasal tersebut ialah penerima barang yang dititipkan harus menyimpan dengan tanggung jawab dan mengembalikan kepada pemilik secara utuh. Dalam kenyataan di kehidupan sekarang ini konsumen tempat parkir kerap kali menjadi pihak yang dirugikan jika terjadi kehilangan atas kendaraanya maupun barang yang dalam kendaraan maupun kerusakan-kerusakan yang terjadi selama waktu penitipan dalam tempat parkir. Terdapat contoh kasus yaitu Anny R Gultom yang pernah kehilangan mobil Toyota Kijang saat belanja di pusat perbelanjaan mangga dua mas, Jakarta pusat, Mobil Toyota kijang yang di sopiri anaknya, Hontas Tambunan, langsung diparkir di lokasi yang dikelola Secure Parking. Tetapi apa hendak dikata, begitu selesai shopping, ibu dan anak itu tak menemukan mobil mereka di tempat semula. Dicari ke berbagai lokasi, tak juga ketemu. Mereka pun meminta pertanggungjawaban Pengelola parkir yaitu PT Securindo Packatama Indonesia (SPI). Tetapi sang pengelola parkir berdalih, kehilangan mobil menjadi tanggung jawab pemilik. Itu sesuai dengan klausul yang terdapat dalam setiap struk karcis parkir. Artinya, PT Securindo Packatama Indonesia

(SPI) berlindung di balik klausul "kehilangan kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik", merasa tidak terima dengan dalih pengelola parkir akhirnya Anny dan Hontas menggugat PT Securindo Packatama Indonesia (SPI) ke pengadilan.¹

Kota Malang merupakan salah satu kota besar yang memiliki banyak area parkir yang dikelola oleh swasta maupun negara. Di area parkir Kota Malang sering ditemui karcis parkir yang merujuk pada klausa baku yang sudah jelas oleh Undang-undang dilarang. Belum ada pernyataan yang jelas mengapa masih banyak pengelola parkir yang masih merujuk pada klausa baku. Sanksi yang belum berjalan maksimal ataupun kurangnya penindakan yang tegas dari Dinas Perhubungan Kota Malang itu yang menjadi pertanyaan. Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 3 Huruf d Tentang Pengelolaan Tempat Parkir menyebutkan pengaturan pengelolaan tempat parkir bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya terhadap bahaya, kerugian dari tindak kejahatan ditempat parkir yang telah ditentukan. Sudah suatu kewajiban bagi pengelola parkir untuk memberikan tanggung jawab jika terjadi suatu kerusakan maupun kehilangan kendaraan untuk memberikan ganti rugi dalam upaya perlindungan konsumen sesuai yang tertera dalam peraturan daerah yang telah disebutkan.² Namun dalam praktiknya belum terlaksana secara optimal dan tidak sesuai dengan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah.

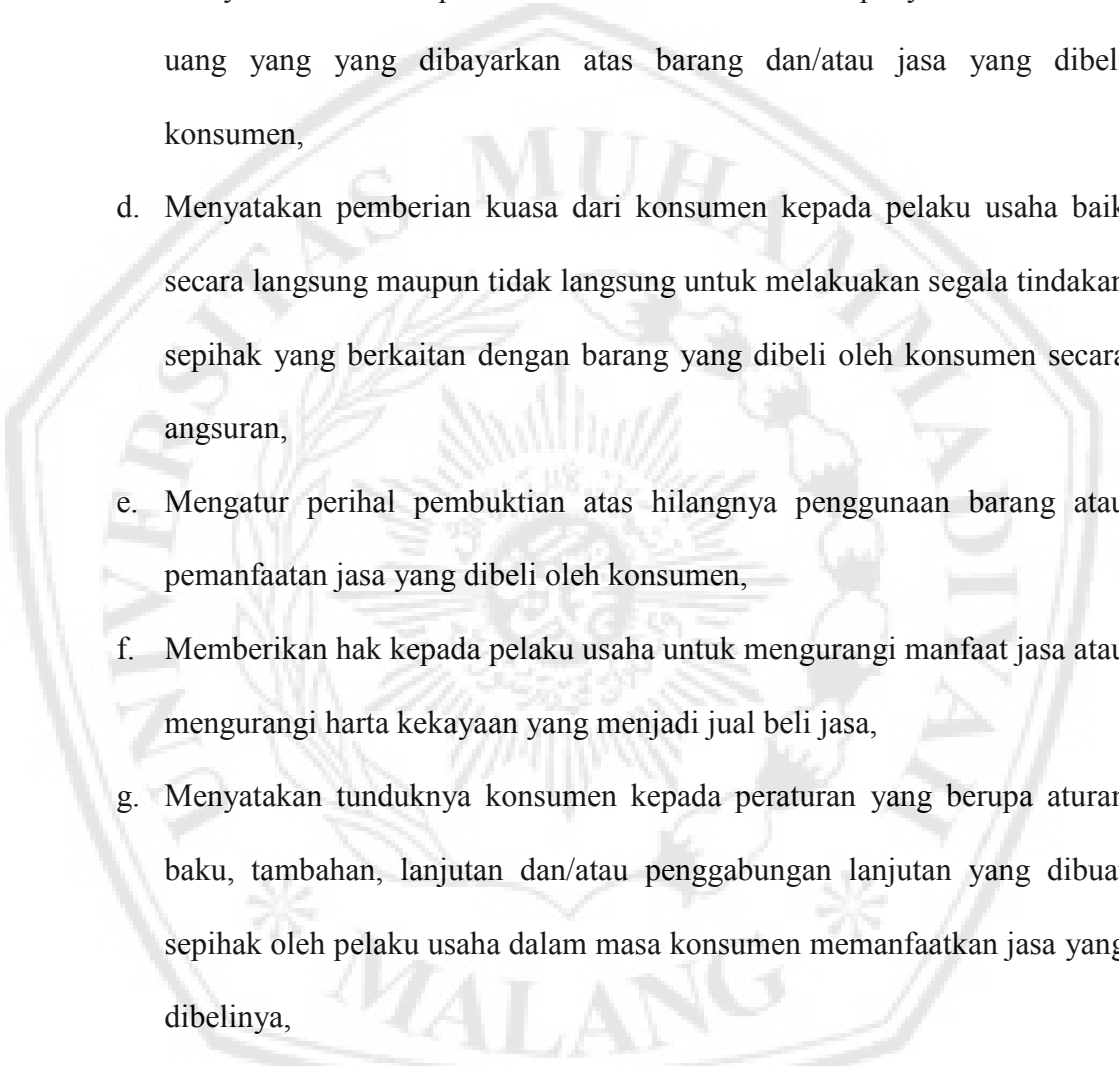
¹Agus Sutondo, *Kendaraan Hilang Pengelola Parkir Wajib Ganti*, <http://agussutondomediacyber.blogspot.co.id> , tgl akses 25 April 2017

² Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti

Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya masalah perlindungan konsumen membuat masyarakat tidak peduli bahwa klausul yang tertera dalam karcis parkir sudah menyimpang dari Undang-Undang yang berlaku. Sehingga masyarakat merasa bahwa hal tersebut tidak terlalu penting untuk dipermasalahkan. Ini yang menjadikan pengelola parkir semakin banyak yang menggunakan klausul tersebut, karena menganggap hal tersebut wajar-wajar saja dan tidak ada masalah dengan pihak yang menitipkan kendaraan. Jika melihat kebelakang sesuai dengan isi peraturan daerah dan Undang-undang hal tersebut merupakan suatu permasalahan serius berhubungan dengan perlindungan konsumen yang menyangkut mengenai ganti rugi barang yang seharusnya didapatkan oleh konsumen yang merasa dirugikan karena itu sudah menjadi hak konsumen dan tanggung jawab pihak pengelola.

Dalam Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sebenarnya memperbolehkan adanya perjanjian baku yang memuat klausula baku di dalam setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/atau jasa. Tetapi tidak boleh mencantumkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Perlindungan Konsumen atau yang biasa disebut dengan UUPK

Pasal 18 UUPK mengatur mengenai ketentuan pencantuman klausula baku, dimana ayat (1) berbunyi : Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditunjukan untuk perdagangan dilarang membuat atau mencantuman klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- 
- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha,
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen,
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli konsumen,
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran,
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya penggunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen,
 - f. Memberikan hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan yang menjadi jual beli jasa,
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baku, tambahan, lanjutan dan/atau penggabungan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya,
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memmmberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang akan dibeli oleh konsumen secara angsuran

Pada pasal 18 ayat (2) UUPK mengatur mengenai pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat terbaca secara jelas atau pengungkapannya sulit di mengerti.

Lebih lanjut dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK mengatur mengenai konsekuensi apabila melanggar ketentuan pada ayat (1) dan (2) maka dapat dinyatakan batal demi hukum. Pada Pasal 18 ayat (4) UUPK mengatakan para pelaku usaha wajib untuk menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang.

Namun yang menjadi permasalahan, pada jasa parkir yang ada pada saat ini, pelaku usaha selalu menggunakan klusa baku pada setiap karcis/tanda parkir, klusa baku menjadi pilihan dari pelaku usaha jasa parkir karena akan memudahkan dalam menjalankan bisnisnya. Meskipun UUPK telah dikeluarkan namun masih banyak pelaku usaha yang belum mengubah atau bahkan enggan untuk mengubah ketentuan klausula baku dalam karcis/bukti penerimaan. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan sistem administrasi yang standar, cepat dan efisien. Pada masa sebelumnya telah menjadi budaya para pelaku usaha secara bebas dapat menentukan isi suatu perjanjian secara sepihak. Penerapan klusa baku oleh pelaku usaha jasa parkir belum menyesuaikan dengan peraturan yang ada menyebabkan kerugian harus dihadapi oleh konsumen³. Perusahaan jasa pelayanan parkir kerap menggunakan klusa baku, karena pada umumnya pengelolaan parkir memuat ketentuan baku yang telah dibuatkan sebelumnya secara sepihak. Ketentuan-

³ DT Bakti, *Perlindungan Konsumen Jasa Parkir*, <http://eprints.ums.ac.id> , tgl akses 23 Maret 2017

ketentuan yang mengatur (*general terms and conditions*) pada perjanjian parkir terdapat dan tercetak pada lembaran kartu parkir yang diterima oleh konsumen. Ketentuan yang mengatur hak-hak dan kewajiban antara konsumen (dalam hal ini dapat dipersamakan dengan kreditur jasa pelayanan parkir) dan Perusahaan (dalam hal ini dapat dipersamakan dengan debitur yang menyediakan jasa pelayanan parkir), perjanjian tersebut telah diberlakukan sepihak dan dianggap diterima oleh pihak lain seketika pihak lain tersebut menerima penawaran (*accept the offer*) jasa dimaksud. Dalam UUPK dinyatakan bahwa Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Prosedur baku dalam pelayanan jasa parkir adalah konsumen menerima secarik tiket atau kertas sebagai bukti telah menyewa ruang dalam area lahan parkir tersebut dan menitipkan kendaraanya demi keamanan. Dibalik kertas atau tiket tersebut umumnya dicantumkan beberapa klausula baku, namun salah satu klausula tersebut umumnya berbunyi “*Pengelola parkir tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan dalam bentuk apapun*”. Mengingat kedudukan para pihak dalam penentuan *terms and conditions* perjanjian baku tidak seimbang, dimana satu pihak (dalam hal ini konsumen) berada pada posisi *take it or leave it*⁴.

⁴ Wawan Pratama, *Tinjauan Hukum Mengenai Klausul*, <http://garisawan.blogspot.co.id>, tgl akses 12 Juli 2017

Bentuk-bentuk klusal baku sering digunakan oleh para pelaku usaha parkir adalah sebagai berikut :

- a. Tarif parkir yang berlaku adalah sebagaimana tercantum pada rambu tarif
- b. Jika tiket ini hilang, maka petugas berwenang memeriksa STNK dan identitas pengemudi, dan dikenakan denda sebesar Rp 10.000 untuk sepeda motor dan Rp 10.000 untuk mobil
- c. Segala kerusakan ataupun kehilangan dari (bagian dari) kendaraan menjadi tanggung jawab dari pengemudi

Dalam pasal 19 ayat (1) UUPK *“Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”*. Maka dari ketentuan pasal tersebut diatas pelaku usaha dapat bertanggung jawab apabila produk barang maupun jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan tersebut mengalami kerusakan, pencemaran, ataupun kerugian pada konsumen. Bentuk kerugian terhadap konsumen dapat dilakukan pelaku usaha dengan ganti rugi atau dengan pengembalian uang, penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara lainnya⁵. Hal tersebut didukung juga oleh sebuah Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 1367 K/Pdt/2002 yang menyatakan secara hukum, bahwa selama pemilik kendaraan parkir/dititipkan dengan sah didalam area parkir yang dikelola oleh

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Gramedia, Pustaka Utama, 2003), hal 53

pengelola parkir adalah merupakan tanggung jawab pengelola parkir sepenuhnya atas telah terjadinya kehilangan.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk dan diharapkan dapat menjawab berbagai macam pertanyaan berkenaan dengan masalah terkait Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir Dalam Hal Terjadi Kehilangan Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kota Malang sesuai dengan latar belakang tersebut diatas, untuk mengkaji perlindungan hukum bagi para pengguna jasa parkir tersebut serta bentuk tanggung jawab yang dapat dituntut oleh pengguna jasa parkir di dalam area parkir di Malang, dengan judul **Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausa Baku Pada Karcis Parkir “(Studi Di Wilayah Hukum Kota Malang)**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana keabsahan klausa baku pada karcis parkir di wilayah hukum Kota Malang ditinjau dari pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir dalam hal kehilangan dan atau kerusakan kendaraan atas penggunaan klausa baku pada jasa parkir di wilayah hukum Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan klausa baku pada karcis parkir di wilayah hukum Kota Malang ditinjau dari Undang-undang Perlindungan Konsumen
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum pengguna jasa parkir dalam hal penggunaan klausa baku pada jasa parkir di wilayah hukum Kota Malang

D. Kegunaan Penelitian

Atas dasar maksud, tujuan, dan alasan sebagaimana penulis uraikan diatas maka dengan ini penulis mempunyai harapan ke depannya nanti akan memiliki manfaat sebagaimana berikut :

1. Kegunaan Akademis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Muhammadiyah Malang program studi hukum perdata dan bisnis. Diharapkan kedepannya nanti akan membawa kemanfaatan akademis dengan memberikan wawasan atau pandangan baru yang berguna bagi pengembangan dan penelitian secara lebih lanjut terhadap ilmu hukum, sehingga kedepannya nanti akan menghasilkan penelitian yang bermanfaat dan berguna untuk masa yang akan datang.

2. Kegunaan Keilmuan

Sebagai bahan referensi dalam keilmuan sehingga memperkaya dan menambah wawasan. Memberikan suatu pandangan baru dalam

penelitian yang akan dikembangkan dimasa mendatang. Serta menyajikan suatu informasi yang baru mengenai kepastian hukum suatu kebijakan dalam masyarakat.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Selain untuk melakukan penelitian dan sebagai syarat untuk menjadi sarjana hukum, harapan penulis melalui penelitian ini ada tambahan pesan moral dan wawasan baru untuk mengurangi penggunaan klausa baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di Kota Malang.

2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dan teliti sebelum menitipkan kendaraan bermotor. Untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen jasa parkir dalam hal menuntut ganti rugi jika kehilangan kendaraan bermotor di area parkir.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan mampu mendorong pemerintah Kota Malang terutama Dinas Perhubungan Kota Malang untuk lebih tegas dalam menindaki kasus penggunaan klausa baku yang terdapat dalam karcis parkir. Serta memberi masukan bagi pemerintah untuk memberikan suatu aturan yang sesuai kepada pihak pengelola parkir untuk memberikan ganti rugi jika terjadi kehilangan barang maupun kendaraan selama parkir.

F. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada analisa masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶

Dalam penelitian ini ditunjang pula dengan *library research* (kepastakaan) yaitu sumber data yang berupa buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan pembahasan. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Jelas bahwa pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian yang bernuansa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di wilayah hukum Kota Malang karena di Kota Malang ini mempunyai informasi, data-data, dan

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 15

fakta yang terkait dengan judul penelitian yang sedang dikerjakan. Selain itu kota Malang juga memiliki titik parkir yang banyak sehingga tidak sedikit kasus kehilangan yang terjadi dan belum terlaksana sepenuhnya perlindungan hukumnya. Dengan dasar seperti itu maka penulis yakin untuk mengangkat masalah terkait dengan perlindungan hukum terhadap konsumen atas penggunaan klausa baku pada karcis parkir di Kota Malang. Lokasi penelitian yang dituju adalah Dinas Perhubungan Kota Malang beralamat di Jl. Raden Intan No.1 Malang dan tempat parkir di wilayah hukum Kota Malang, parkir timur Malang Town Square yang terletak di Jl. Veteran No 2 Kota Malang, dan parkir pertokoan depan Rumah Sakit Lavallete yang terletak di Jl. WR. Supratman, Rampal Celaket, Klojen, Kota Malang.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini terdapat tiga jenis data yang menjadi acuan penulis dalam mengerjakan penelitian ini :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama darimana data tersebut diperoleh. Data ini diperoleh langsung dari tempat penelitian di wilayah hukum Kota Malang. Data primer yang dicari adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa parkir dalam hal penggunaan klausa baku pada karcis parkir. Penulis juga melakukan wawancara kepada Kepala Seksi Bidang Perparkiran Dinas

Perhubungan Kota Malang yaitu Bapak Dwi, Koordinator Peparkiran Kota Malang yaitu Bapak Nanang, dan petugas parkir yaitu Bapak Fajar.

Data sekunder merupakan data yang sudah tersedia sehingga tinggal mencari dan mengumpulkan data-data dan masukan-masukan sekitar masalah objek yang dikaji melalui penelitian yang bersumber pada literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak dibahas. Dalam hal ini peneliti menyiapkan literature yang berupa peraturan perundang-undangan yang tentunya berkaitan langsung dengan objek penelitian yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Parkir, Putusan Mahkamah Agung No. 1367 K/Pdt/2002, dan dokumen yang diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Malang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan penelitian lapangan berdasarkan fakta yang ada melalui beberapa kegiatan pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dijelaskan sebagaimana berikut:

a. Observasi

Observasi adalah sebuah cara pengumpulan data yang diperoleh penulis selama melakukan penelitian di lokasi penelitian yang

berdasarkan fakta yang ada. Dalam hal ini penulis terjun langsung di setiap lokasi dimana di tempat tersebut sering dijumpai para petugas parkir yang menggunakan klausa baku yang bertentangan dengan pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

b. Wawancara

Wawancara adalah sebuah cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan cara melakukan sesi tanya jawab dengan satu objek penelitian mengenai kajian objek yang sedang dilakukan penelitian untuk memperoleh informasi dari informan sasaran tersebut. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (*in-deptahun*) yaitu salah satu proses atau cara untuk memperoleh informasi maupun data yang sekiranya diperlukan dalam penelitian ini dengan dilakukan sesi Tanya jawab secara *face to face* antara interviewer dengan pemberi informasi saran dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara dimana informan dan interviewer terlibat secara langsung.⁷ Kemudian penulis menggunakan metode ini untuk mengajukan pertanyaan kepada informan yaitu kepada bapak Nanang selaku koordinator parkir kota Malang dan bapak Dwi selaku kepala seksi bidang parkir Dinas Perhubungan Kota Malang

⁷ Mudjirahardjo, *Mengenal Lebih Jauh Tentang Studi Kasus*, <http://mudjirahardjo.uin-malang.ac.id>, tgl akses 21 Maret 2017

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis melalui data data lain yang mendukung akan penelitian ini. Termasuk beberapa foto maupun peristiwa suatu kejadian yang pernah terjadi sebelumnya dan tentunya masih dalam lingkup bahan yang dibutuhkan untuk penelitian terkait analisa perlindungan hukum terhadap konsumen atas klausa baku pada karcis parkir.

5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder, peneliti kemudian menganalisanya secara bersamaan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu data-data yang telah diproses akan dianalisa dan digambarkan sedemikian rupa sehingga diperoleh sesuai kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini penulis membagi dalam 4 BAB, yang masing-masing bagian dijabarkan sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan

Pada Bab ini penulis akan menguraikan akan latar belakang dari Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausa Baku Pada Karcis Parkir Di Kota Malang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat kegiatan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka

Pada Bab ini diuraikan pendapat ahli hukum dan kajian yuridis normatif sesuai dengan hukum yang masih berlaku dan dipakai dalam penelitian ini. Tujuan utama dari objek penelitian ini yaitu Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausa Baku Pada Karcis Parkir Di Kota Malang.

BAB III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada Bab ini berisi mengenai uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis terkait Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausa Baku Pada Karcis Parkir Di Kota Malang, serta dari penelitian ini menganalisis secara content, invormative, dan dianalisa berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, dengan didukung teori-teori yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ini.

BAB IV. Penutup

Pada Bab terakhir ini berisikan kesimpulan dari permasalahan hukum mengenai Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Klausa Baku Pada Karcis Parkir Di Kota Malang.